SKRIPSI

PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN SAMBAS

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:

Hidayatullah
NIM. E1031191081

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN SAMBAS

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Hidayatullah

NIM. E1031191081

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Yulius Yohanes, M.Si
NIP: 196405271992021001

Tanggal: 22 September 2025

Dosen Pembimbing Pendamping

Aliyah Nuraini Hanum, S.Sos, M.Si
NIP. 198104232005012002

Tanggal: 22 September 2025

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN SAMBAS

Oleh:
Hidayatullah

NIM. E1031191081

Dipertahankan di	: Pontianak
Pada Hari/Tanggal	: 19 Mei 2025
Waktu	: 10.00 - Selesai
Tempat	: Rungan Sidang FISIP UNTAN

Tim Penguji

Ketua

Dr. Yulius Yohanes, M.Si
NIP. 196405271992021001

Sekretaris

Aliyah Nuraini Hanum, S.Sos, M.Si
NIP. 198104232005012002

Penguji Utama

Dr. Erdi, M.Si
NIP. 196707272005011001

Penguji Pendamping

Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si
NIP. 198306272006042020

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Hidayatullah: Peran Dinas Komunikasi Dan Informatika Dalam Keterbukaan Infrmasi Publik Di Kabupaten Sambas. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Tanjungpura Pontianak 2024.

Penelitian ini berjudul "Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Sambas". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sambas. Adapun metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, yakni metode dengan berdasarkan data-data atau fakta- fakta dari para informan yang terjadi di lapangan dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu 1). Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; 2). Masyarakat Kabupaten Sambas (4 orang). Sumber sekunder yaitu 1). *Website* resmi pemerintah Kabupaten Sambas; 2). Peraturan Bupati Kabupaten Sambas; 3). Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; dan 4). Literatur-literatur yang sudah peneliti baca. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) dalam keterbukaan informasi publik belum terlakasana dengan baik, informasi yang dikelola oleh bagian humas belum terlaksana dengan baik, dan belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi dua arah antara pemerintah dengan publik. Semua permasalahan penelitian di atas sangat memerlukan strategi yang tepat dari praktisi DISKOMINFO agar peran yang dilaksanakan berjalan dengan maksimal. Maka dari itu, hasil penelitian di bawah ini menjadi gambaran peran humas pemerintah yang sudah di alih fungsikan ke DISKOMINFO yang di lakukan oleh praktisi DISKOMINFO Kabupaten Sambas untuk menjadi bahan evaluasi ke depannya.

Kata Kunci: Peran DISKOMINFO, Keterbukaan Informasi Publik, dan *Website* Pemerintah

ABSTRACT

Hidayatullah: The Role of the Communication and Information Agency in Public Information Disclosure in Sambas Regency. Government Science Study Program. Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak 2024.

The study entitled "The Role of the Communication and Information Agency in Public Information Disclosure in Sambas Regency" aims to analyze and describe the functions of the Communication and Information Agency in disseminating public information within the region. This research employed a qualitative approach, utilizing data obtained from field informants through interviews, observation, and documentation. The data sources consisted of primary and secondary materials. Primary data were collected from (1) the Public Information and Communication Management Division and (2) four community members of Sambas Regency. Meanwhile, the secondary data were derived from (1) the official website of the Sambas Regency Government, (2) regulations issued by the Regent of Sambas, (3) the Public Information Disclosure Act, and (4) relevant literature reviewed by the researcher. The findings indicate that the Communication and Information Agency has not fully carried out its role in public information disclosure. Public relations information management remains ineffective, and the facilitation of two-way communication between the government and society is still limited. These issues highlight the need for more effective strategies by the Communication and Information Agency practitioners to optimize their role. Furthermore, this study also outlines the government's public relations functions delegated to the Communication and Information Agency in Sambas Regency, which may serve as a basis for future evaluation.

Keywords: *Role of the Communication and Information Agency, Public Information Disclosure, and Government Website*

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Sambas". Identifikasi masalah yang mendasari penelitian ini adalah informasi yang dikelola oleh DISKOMINFO belum terlaksana dengan baik dan belum optimalnya penyelenggaraan informasi dua arah antara pemerintah dan publik maka dari itu, dapat dilihat bahwa kurang maksimalnya peran Dinas Komuniasi dan Informatika dalam keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sambas.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori peranan humas (Rosady Ruslan 2016, 26-27), yaitu *communicator* (jembatan komunikasi antara organisasi dengan publiknya), *relationship* (pembina hubungan positif antara lembaga yang diwakilinya dengan pihak internal dan eksternal), *back up management* (pendukung dalam fungsi manajement), *good image maker* (pencipta citra positif). Kemudian teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Dinas Komuniasi dan Informatika dalam keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sambas kurang maksimal, dikarenakan peran DISKOMINFO sebagai *communicator* belum terjadi dua arah antara humas dengan publik. Disebabkan oleh penyampaian informasi yang optimal secara merata keseluruh lapisan masyarakat dan hanya bersifat informatif sehingga daya tarik pesan dan tidak menggugah publik untuk

interaktif dalam melakukan komunikasi dua arah. Peran DISKOMINFO sebagai *relationship* belum optimal dikarenakan belum terjalin hubungan dan kerjasama yang membangun kepercayaan masyarakat Kabupaten Sambas. Menyebabkan masyarakat masih belum memahami tupoksi DISKOMINFO sebagai penyambung lidah organisasi antara pemerintah dan publik. Peran DISKOMINFO sebagai *back up management* masih belum optimal terkait dengan fungsi manajemen kehumasan. Dikarenakan manajemen organisasi yang dilakukan masih belum terjadi hubungan yang harmonis antara kedua sisi khususnya dari sisi masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya komunikasi yang lebih baik oleh DISKOMINFO dengan masayarakat. Peran DISKOMINFO sebagai *good image maker* masih belum optimal dikarenakan masyarakat sambas belum familiar terhadap media sosial, oleh karena itu DISKOMINFO harus bisa mengemas data dan informasi sebaik mungkin dalam artian mudah untuk dipahami dan juga meminimalisir terjadinya miss komunikasi.

Saran untuk penelitian ini adalah agar informasi yang disamapikan oleh DISKOMINFO kepada publik dapat berjalan dengan baik maka perlu optimatilisasi sosialisasi yang melibatkan media pemerintah dan media sosial lainnya didukung dengan peningkatan sumber daya masyarakat.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Hidayatullah

Nomor Mahasiswa : E1031191081

Program Studi / Angkatan : Ilmu Pemerintahan / 2019

Saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 04 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Hidayatullah

NIM.E1031191081

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Somos Libres Siempre Solamente Por Tu Vash"

"Jika setiap orang merupakan individu yang bebas untuk meraih apapun yang diinginkannya"

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tuaku:

Bapak Supriadi, SH dan Ibu Aisyah

Melalui skrpsi ini, saya mencoba memberikan yang terbaik untuk kalian berdua. Ingin sekali saya melihat kalian bangga terhadap saya. Betapa tak ternilai kasih sayang, pengorbanan, dan perjuangan kalian untk saya. Terima kasih banyak atas dukungan moril maupun materil serta doa kalian yang tak henti-hentinya mendokan saya hingga saya bisa dititik sekarang. Terima kasih telah berkorban dan berjuangan untuk saya selama ini.

- Diriku sendiri yang sudah berjuang, bertahan, sabar, ikhlas, dan bisa melewati segala hambatan dan lika liku di bangku perkuliahan.
- Adik saya Nadhira Thafana yang selalu mendukung saya.
- Kelurga Maklong dan Keluarga Besar Mahasiswa FISIP UNTAN yang telah membersamai selama proses perkuliahan.
- Teman seperjuangan sekaligus keluarga selama saya berkuliah, terima kasih atas segala bantuan dan sekaligus motivator saya selama saya menjadi mahasiswa.

- Dan lainnya yang juga banyak memberikan dukungan, motivasi, moril, serta materil sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Sambas". Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, saya menyadari jika penyusunan ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagaipihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik Universitas Tanjungpura.
2. Bima Sujendra, S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Yulius Yohanes, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberi kemudahan dan arahan, serta motivasi dan bimbingan selama proses skripsi ini.
4. Aliyah Nuraini Hanum, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan serta motivasi dan bimbingan selama skripsi ini.
5. Dr. Erdi, M.Si selaku Dosen Penguji Utama yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan serta motivasi dan bimbingan selama skripsi ini.
6. Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si Dosen Penguji Pendamping yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan serta motivasi dan bimbingan selama skripsi ini.

7. Silverius Tey Seran, S.STP, M.AP selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi kemudahan dan arahan, serta motivasi dan bimbingan selama proses pengerjaan skripsi ini.

8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Beserta Staf Kabupaten Sambas yang telah memberi informasi dan data yang dibutuhkan saat penelitian.

Peneliti menyadari Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga hasil skripsi ini dapat memberikan manfaat serta dapat dikembangkan lebih lanjut kedepannya.

Pontianak, Oktober 2024

Hidayatullah

E1031191081

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vi**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **viii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 10
1.3. Fokus Penelitian 10
1.4. Rumusan Masalah 10
1.5. Tujuan Penelitian 10
1.6. Manfaat Penelitian 11
1.6.1. Manfaat Teoritis 11
1.6.2. Manfaat Praktis 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
2.1. Definisi Konsep 12
2.1.1. Peran 12
2.1.2. Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) 15
2.1.3. Keterbukaan Informasi Publik 16
2.2. Teori 17
2.2.1. Manajemen Humas 17
2.2.2. Peranan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) 19

2.3. Penelitian Yang Relevan 20
2.4. Alur Pikir Penelitian 24
2.5. Pertanyaan Penelitian 25

BAB III METODE PENELITIAN 26
3.1. Jenis Penelitian 26
3.2. Langkah-langkah Penelitian 27
3.2.1. Melakukan Pra Penelitian (Pra-*Survey*) 27
3.2.2. Penyusunan Outline 27
3.2.3. Penyusunan Usulan Penelitian 27
3.2.4. Seminar Usulan Penelitan 28
3.2.5. Penelitian Lapangan 28
3.2.6. Menyusun Laporan Hasil Penelitian (Skripsi) 28
3.2.7. Ujian Skripsi 29
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 29
3.3.1. Lokasi Penelitian 29
3.3.2. Waktu Penelitian 29
3.4. Subjek dan Objek Penelitian 31
3.5. Teknik Pengumpulan Data 32
3.5.1. Wawancara 32
3.5.2. Observasi 33
3.5.3 Dokumentasi 33
3.6. Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 34
3.7. Analisis Data 34
3.7.1. Teknik Keabsahan Data 34
3.7.2. Teknik Analisis Data 36
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 39
4.1. Gambaram Umum Wilayah Kabupaten Sambas 39
4.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Sambas 39
4.1.2. Luas Wilayah Kabupaten Sambas 40
4.1.3. Keadaan Klimatologi 42
4.1.4. Keadaan Demografis 42

4.2. Gambaran Umum DISKOMINFO Kabupaten Sambas 45
4.2.1. Sejarah DISKOMINFO Kabupaten Sambas 45
4.2.2. Visi dan Misi Kabupaten Sambas..... 48
4.2.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DISKOMINFO Kabupaten Sambas 50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 62
5.1. Deskripsi Hasil Penelitian 62
5.2. Pembahasan 65
5.2.1. *Communicator* 66
5.2.2. *Relationship* 69
5.2.3. *Back Up Management* 71
5.2.4. *Good Image Maker* 72
BAB VI PENUTUP 75
6.1. Simpulan 75
6.2. Saran 78
6.3. Keterbatasan Penelitian 79
6.4. Implikasi 79
6.4.1. Implikasi Teoritis 79
6.4.2. Impliasi Praktis 80
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN 83

DAFTAR TABEL

Tabel ..... **Hal**

3.1. Jadwal Penelitian 30

4.1. Luas Wilayah Kabupaten Sambas 41

4.2. Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Kabupaten Sambas Menurut Kecamatan Tahun 2010 – 2020 43

4.3. Data Kepadatan Penduduk dan LPP Kabupaten Sambas Menurut Kecamatan Tahun 2010-2020 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar ..... **Hal**

1.1. Profil Halaman *Website Sambas.go.id* 8

1.2. Halaman *Website Sambas.go.id* 8

2.1. Bagan Alur Pikir Penelitian 24

4.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sambas 60

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Paradigma baru, yaitu paradigma *governance* yang mengarah pada proses *good governance*, harus diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan. Setiap pelayanan yang diberikan harus bersifat terbuka, dapat diakses, akuntabel, dan transparan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan *good governance*, instansi pemerintah seperti dinas, departemen, dan instansi yang tergabung dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai menyadari pentingnya masukan masyarakat dan pihak terkait. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sambas. Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk menumbuhkan rasa keterbukaan, aksesibilitas, dan transparansi. Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) adalah instansi yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi dimana dalam setiap

kegiatannya selalu berhubungan dengan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Komputer Antar Bidang, Pengelolaan Produksi Informasi dan Publikasi, Pengelolaan dan Pengembangan Komunikasi Publik, yang mana pada setiap kegiatan-kegiatan tersebut terbagi menjadi 3 bidang serta 1 Sekretariat, dimana disetiap bidangnya dibawahi oleh kepala bidang. Fungsi utama DISKOMINFO adalah mengatur jalannya informasi, baik kedalam maupun keluar mengenai informasi dan penjelasan yang diberikan kepada publik tentang peraturan, program, dan perilaku dari organisasi sehingga dapat dimengerti untuk mendapatkan dukungan dan penerimaan dari publik.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan dan mewujudkan misi pemerintahan yang baik, pemerintah dan pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam prosesnya pengambilan keputusan termasuk perumusan dan penetapan kebijakan publik, dengan memfasilitasi jaminan akses terhadap informasi publik melalui pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secepat yang diamanatkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. SOP (Standar Operasional Prosedur) Keterbukaan Informasi Publik adalah pedoman atau aturan yang mengatur bagaimana informasi publik dikelola dan disebarkan kepada masyarakat dengan cara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, Keterbukaan Informasi Publik diatur oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan berbagai peraturan pelaksanaannya. SOP ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi badan publik dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat serta memastikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan efisien.

Di dalam upaya pengoptimalan keterbukaan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan SOP, sebagai berikut:

1. Prosedur Permohonan Informasi
    a. Masyarakat yang ingin mengakses informasi publik harus mengajukan permohonan secara tertulis atau melalui kanal yang telah disediakan (misalnya *website*, aplikasi).
    b. Permohonan harus mencantumkan identitas pemohon dan rincian informasi yang dibutuhkan.
2. Penanganan Permohonan Informasi
    a. Setelah menerima permohonan, DISKOMINFO akan memverifikasi kelengkapan informasi yang diminta.
    b. Jika informasi tersebut tersedia dan dapat diberikan, maka informasi tersebut akan disediakan dalam jangka waktu yang ditentukan (umumnya 10 hari kerja).
    c. Apabila permohonan tidak dapat dipenuhi (misalnya informasi tersebut masuk dalam kategori yang dikecualikan), maka pemohon harus diberitahu dan diberikan alasan penolakan.
3. Penanganan Pengaduan dan Sengketa
    a. Jika pemohon merasa tidak puas dengan hasil permohonan atau ada sengketa terkait keterbukaan informasi, maka bisa mengajukan keberatan ke Komisi Informasi Kabupaten Sambas.

4. Penyediaan Informasi Publik
    a. DISKOMINFO bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik melalui berbagai media, seperti *website* resmi atau publikasi lainnya.
    b. DISKOMINFO harus memastikan bahwa informasi yang disediakan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Pelatihan dan Sosialisasi
    a. DISKOMINFO wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak mereka untuk mengakses informasi publik.
    b. Selain itu, aparat yang terkait juga harus diberikan pelatihan tentang bagaimana melayani permohonan informasi dengan baik dan benar

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Tentu saja, dinamika pengelolaan informasi publik berbeda-beda dari satu instansi ke instansi lainnya. Intensitas dan cara pekerjaan dilakukan memiliki dampak yang signifikan terhadap hal ini. Selanjutnya, untuk mengelola informasi dan pekerjaan yang telah dilakukan, mungkin akan banyak tantangan, seperti bekerja sama dengan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) untuk

mengkoordinasikan informasi bertanggung jawab atas pengelolaan data publik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan juga tercantum dalam peraturan internal masing-masing badan publik, semua badan publik harus mengelola informasi publik yang dimilikinya seefektif mungkin dan memberikan layanan informasi kepada publik sebagai pemohon informasi.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia (HAM) dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

khususnya di Kabupaten Sambas dan salah satu cara membangun kepercayaan publik adalah melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat. Selain itu, informasi yang disajikan juga berpengaruh terhadap penilaian masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan oleh DISKOMINFO. Dengan memberikan informasi yang baik dan sesuai, maka masyarakat akan puas dengan kinerja yang telah diberikan pemerintah.

Salah satu divisi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat adalah DISKOMINFO. Informasi yang diberikannya memberikan dampak yang jelas terhadap persepsi masyarakat terhadap pemerintah di daerah dimana DISKOMINFO berada. Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang terbit mulai 01 Mei 2010 yang berdasar pada pasal 28 UndangUndang Dasar 1945 huruf F yang berbunyi setiap individu berhak melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi untuk kemajuan individu dan

kelompok di lingkungan sekitarnya, serta berhakuntuk mencari, mendapatkan, serta mengelola dan menyebarluaskan informasi melalui media yang tersedia.

Seketariat Daerah Kabupaten Sambas merupakan instansi yang dipimpin oleh Seketaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Perangkat Daerah (SKPD). Salah satu bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas (Setda) yang bertugas mendistribusikan informasi publik adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO). DISKOMINFO harus mampu menghimpun informasi terkini mengenai kejadian-kejadian di wilayah Kabupaten Sambas karena berfungsi sebagai pusat informasi daerah. Alhasil, kinerja kehumasan akan terfasilitasi dengan terjalinnya hubungan yang positif dengan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Secara garis besar, ada dua peran yang terlibat di dalam kegiatan komunikasi dan informatika di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Kabupaten Sambas yaitu sebagai teknisi dan manajemen. Tugas DISKOMINFO sebagai mewakili seni dari instansi itu sendiri seperti penyusunan *press release* agenda atau aktivitas dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sambas, melaksanakan peliputan dan melakukan dokumentasi agenda, mengevaluasi berita, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan publikasi, dan mengelola *website* Pemda Kabupaten Sambas *sambas.go.id*. Tugas atau peran DISKOMINFO sebagai manajemen berfokus pada kegiatan yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah terkait komunikasi publik seperti melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi sesuai dengan tugas dan fungi DISKOMINFO. Disinilah kemahiran DISKOMINFO diperlukan dalam

menyampaikan informasi dan mengelola informasi yang baik, karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan publik dan juga pada dasarnya komunikasi dua arah lebih baik daripada komunikasi satu arah. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas masih belum merata, atau belum semua warga menerima informasi atau pesan yang disampaikan oleh DISKOMINFO. Pada saat ini Kabupaten Sambas masih terkendala sarana dan prasarana. yang positif dengan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Secara garis besar, ada dua peran yang terlibat di dalam kegiatan komunikasi dan informatika di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Kabupaten Sambas yaitu sebagai teknisi dan manajemen. Tugas DISKOMINFO sebagai mewakili seni dari instansi itu sendiri seperti penyusunan *press release* agenda atau aktivitas dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sambas, melaksanakan peliputan dan melakukan dokumentasi agenda, mengevaluasi berita, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan publikasi, dan mengelola *website* Pemda Kabupaten Sambas *sambas.go.id*. Tugas atau peran DISKOMINFO sebagai manajemen berfokus pada kegiatan yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah terkait komunikasi publik seperti melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi sesuai dengan tugas dan fungi DISKOMINFO. Disinilah kemahiran DISKOMINFO diperlukan dalam menyampaikan informasi dan mengelola informasi yang baik, karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan publik dan juga pada dasarnya komunikasi dua arah lebih baik daripada komunikasi satu arah.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas masih belum merata, atau belum semua warga menerima informasi atau pesan yang disampaikan oleh DISKOMINFO. Pada saat ini Kabupaten Sambas masih terkendala sarana dan prasarana.

Gambar 1.1

Profil Halman Website Sambas.go.id



Sumber : Website resmi Pemerintah Kabupaten Sambas (2023)

Gambar 1.2.



Sumber : Website resmi Pemerintah Kabupaten Sambas (2023)

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan peneliti pada situs resmi

Pemerintah Kabupaten Sambas menunjukan hasil yang cukup memperihatinkan. Statistik pengunjung situs resmi, tercatat total pengunjung dalam satu hari (Minggu, 11 Juni 2023) mencapai 316 orang, dalam satu bulan (Juni 2023) mencapai 297 orang, dan pertahun mencapai 6761 orang, dengan jumlah total keseluruhan mencapai 7113 orang. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sambas yaitu523.705 orang. Perbedaan yang sangat terlihat jelas sekaligus menunjukan bahwa kurangnya sosialisasi yang mana berpengaruh pada kurang optimalnya penyelenggaraan komunikasi dua arah antara pemerintah dengan publik. Buktinya, data penyelenggaraan sosialisasi hanya dilakukan sebanyak satu kali dalam setahun. Salah satunya pada tahun 2022 diadakan sosialisasi PPID Desa di Kecamatan Tebas. Informasi yang tersaji pada pada situs atau portal resmi Pemerintah Kabupaten Sambas memuat informasi seperti kunjungan kerja, raperda, dan undangan peresmian. Pada tanggal 8 Mei 2023 Bupati Satono resmikan surau Multazam Danau Sebedang. Kehadiran humas di Seketariat Daerah Kabupaten Sambas sebagai fasilitator komunikasi memberikan wadah kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi serta menyampaikan aspirasi melalui portal resmi Kabupaten Sambas di *website sambas.go.id* belum terlaksana dengan baik. Dari statistik pengunjung situs tersebut terlihat bahwa, pengelolaan dan distribusi informasi masih menjadi permasalahan utama dalam kasus keterbukaan informasi publik. Seharusnya informasi menjadi santapan utama bagi masyarakat dalam kebetuhan informasi. Dari hal ini peran dari humas dipertanyakan keaktifanya.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul "Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Sambas".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telahdijelaskan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Informasi yang dikelola oleh DISKOMINFO belum terlaksana dengan baik.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi dua arah antara pemerintah dengan publik.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, fokus penelitian ini adalah "Peran tentang Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam Keterbukaan Informasi Publik melalui *website* Pemerintah Derah Kabupaten Sambas Di Kabupaten Sambas".

1.4. Rumusan Masalah

Dari masalah yang telah disebutkan diatas, maka terdapat rumusan masalah "Bagaimana Peran Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam Keterbukaan Informasi Publik terkait manfaat fungsi DISKOMINFO Di Kabupaten Sambas?"

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran humas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam keterbukaan informasi publik melalui *website* pemerintah di Kabupaten Sambas.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut

:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara akademis mampu menjadi referensi ilmiah dalam rangka membangun ilmu pemerintahan di masa mendatang yang memiliki relevansi dan sebagai sumbangan pemikiran gambaran sistem pengorganisasian pemerintahan.

1.6.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas yaitu menjadi bahan bacaan dan evaluasi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas terkait Keterbukaan Informasi Publik.
2. Masyarakat yaitu menjadi bahan bacaan dan juga referensi dalam pengetahuan serta pembelajaran terutama dalam hal Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peneliti lainnya yaitu dapat menjadi tolak ukur penelitian dan juga pengembangan teori yang mana akan berguna untuk mahasiswa lainnya sebagai kajian dan penelitian yang akan dilakukan kedepannya.